

HEGEMONI AMERIKA SERIKAT DI ASIA TENGGARA

Oleh:

Salman Al Paris Sormin, S.Pd.,M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP- UGN Padangsidempuan

Abstract

The arrival of the United States was first to Southeast Asia more driven by economic interests. However, after the end of World War II political and security interests became a major consideration for the country. As a new imperial power in the world, the presence of the United States in Southeast Asia has had a major impact on the region, both politically, economically, and in terms of security. Even that influence continues to this day. The involvement of the United States in the arena of politics and security in Southeast Asia, especially since the end of World War I, I was not a groundless act. Although the territory of the United States is not so wide in Southeast Asia, it only covers the Philippines, but the political implications are very great for countries in Southeast Asia. The importance of Southeast Asia for the United States can be seen from sharing aspects, namely: Geo Economical, Geo Strategic, Geo Politis. Geo Economically Southeast Asia is important for America as an export and import partner.

Kata Kunci: Hegemoni, Amerika Serikat, Asia Tenggara

1. PENDAHULUAN

Kedatangan Amerika Serikat ke Asia Tenggara

Kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara pertama kali dimulai pada abad ke-16. Alasan utama kedatangan mereka adalah ekonomi, dalam arti mencari komoditas perdagangan, di samping kepentingan agama. Portugis adalah kekuatan Eropa pertama yang membuka akses jalur perdagangan yang sangat menguntungkan ke Asia Tenggara, dengan cara menaklukkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511. Kemudian diikuti oleh Belanda, Spanyol, Inggris, dan Amerika (D.G.E. Hall, 1986: hal 197-206). Kedatangan para kolonis itu menyebabkan Asia Tenggara jatuh ke tangan kekuasaan Barat (Eropa), kecuali Thailand yang mampu melakukan diplomasi politik yang baik sehingga negara itu terlepas dari belenggu penjajahan.

Dibandingkan dengan negara-negara Barat lainnya kedatangan Amerika Serikat ke Asia Tenggara relatif terlambat. Negara itu baru melibatkan diri sebagai kekuatan imperialis di Asia Tenggara di penghujung abad ke-19, yakni dengan penguasaan atas Filipina pada tahun 1898 (Wikipedia bahasa Indonesia, Sejarah Asia Tenggara, 2008: hal 4). Penguasaan Amerika Serikat atas Filipina dikecam oleh negara-negara Eropa lainnya, karena dianggap telah melanggar Doktrin Monroe. Dalam Doktrin Monroe dinyatakan bahwa Amerika Serikat hanya berkepentingan untuk mengamankan daerah di bagian barat wilayahnya, dan tidak memiliki semangat ekspansi wilayah apalagi sampai ke Asia Tenggara. Dengan kata lain Doktrin Monroe mengandung semangat anti imperialisisme dan kolonialisme (William L. Bradley dan Mochtar Lubis, 1991, hal 20-23).

Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869, dan kemajuan teknologi perkapalan telah mendorong Amerika Serikat untuk terlibat di Asia

Tenggara. Apalagi sebagai negara industri yang baru muncul Amerika Serikat juga membutuhkan daerah lain sebagai pelepasan hasil industri, serta sumber bahan mentah. Dalam hal ini kawasan Asia Tenggara amat cocok dengan kebutuhan pengembangan imperialisisme Amerika Serikat. Hanya saja ketika Amerika Serikat menjajakan kakinya di Asia Tenggara sebagian besar wilayah di Asia Tenggara sudah dikuasai oleh Inggris, Belanda, dan Prancis. Kesempatan untuk masuk hanya terbuka di Filipina ketika daerah itu membebaskan dirinya dari kekuasaan Spanyol pada tahun 1898.

Kekuasaan Amerika Serikat Di Filipina

Sejak abad ke-16 Filipina merupakan daerah kekuasaan Spanyol. Guna menjalankan kekuasaannya pemerintah Spanyol menempatkan seorang Gubernur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Di samping kekuasaan politik, Spanyol juga melakukan politik asimilasi dengan menyebarkan agama Katolik kepada seluruh masyarakat. Secara struktur kelembagaan di Manila ditempatkan seorang Uskup yang berada langsung di bawah Paus. Dengan demikian imperialis Spanyol tidak hanya dilakukan secara politik, namun juga secara keagamaan.

Gaya imperialisisme Spanyol yang ortodok dan kolot itu menimbulkan tekanan dan penderitaan bagi rakyat Filipina, sehingga pada akhirnya menimbulkan perlawanan. Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya kebangkitan nasionalisme Filipina lebih awal. Gerakan nasionalisme Filipina dimulai lahirnya *Companerismo* pada tahun 1880, yang kemudian disusul oleh Liga Filipina di bawah Jose Rizal dua tahun berikutnya. Pada tahun 1893 Andres Bonifacio mendirikan gerakan Katipunan (Waridah Q.Siti, 1997, hal 34-36).

Partai-partai yang muncul kemudian memelopori perlawanan terhadap pemerintah Spanyol. Akibatnya muncul pemberontakan rakyat di berbagai tempat. Pemerintah Spanyol yang kewalahan akhirnya mengikat kaum nasionalis dalam sebuah perjanjian Biaena Bato tahun 1897, yang isinya pemerintah akan melakukan perbaikan sistem pemerintahan dalam tiga tahun (Mukhtar kamal, 1986: 54).

Perjanjian Biaena Bato ternyata tidak mampu meredam perlawanan rakyat Filipina, sehingga memicu terjadinya perang terbuka. Amerika Serikat yang terlibat perang dengan Spanyol di Laut Karibia (perang kemerdekaan Cuba) memberikan bantuan langsung kepada rakyat Filipina. Keterlibatan Amerika Serikat dalam perang amat menentukan sehingga Spanyol terusir dari Filipina pada tahun 1898 (Wikipedia, ensiklopedia bebas, 2008, hal 3).

Bantuan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Filipina ternyata tidak cuma-cuma. Berdasarkan Perjanjian Paris yang ditandatangani Amerika Serikat dan Spanyol pada tanggal 10 Desember 1898 maka Filipina diserahkan oleh Spanyol kepada Amerika Serikat (Farida Welly, 2005, hal 64). Perjanjian Paris mengawali imperialisme Amerika Serikat di Filipina hingga berakhir tahun 1946, bersamaan dengan masuknya Jepang.

Masa kekuasaan Amerika Serikat di Filipina dapat dibagi dalam tiga fase, yakni: Periode 1898-1942, Periode 1942-1945, dan Periode 1945-1946. Fase pertama ditandai dengan usaha memperkokoh kekuasaan Amerika dengan jalan mengikat perjanjian dengan tokoh-tokoh nasionalis dan agama, dengan jaminan bahwa Filipina akan dimerdekakan 50 tahun kemudian. Dalam rangka membimbing rakyat Filipina ke arah persiapan pemerintahan sendiri, Amerika membentuk pemerintahan sipil dengan William Taff sebagai Gubernur pertama. Setelah itu segera dibentuk undang-undang "*The Tydings Me Duffie Act*" pada tahun 1934 sebagai undang-undang Filipina merdeka (Farida Welly, 2005, hal 94-95).

Fase kedua adalah masa kekalahan Amerika melawan Jepang, yang mengakibatkan Filipina jatuh ke tangan Jepang. Pemerintah Jepang membentuk pemerintahan boneka di Filipina di bawah Jose Laurel. Pemerintahan militeristik Jepang yang kejam ditentang oleh rakyat Filipina dalam bentuk gerakan Hukbalahap (Gerakan Rakyat Anti Jepang) di bawah Luis Taruc dan Alejandreno (Mukhtar Kamal, 1986, hal 58).

Fase ketiga dimulai dengan kekalahan Jepang. Amerika yang sudah berjanji untuk memerdekakan Filipina segera menepati janjinya dengan memberikan kemerdekaan kepada Filipina pada tanggal 4 Juli 1946. Sebagai presiden pertama terpilih Manuel Roxas. Kemerdekaan yang diberikan Amerika hanyalah secara politik. Amerika yang tidak ingin kehilangan pengaruh di

kawasan Asia Tenggara, serta Perang Dingin yang baru saja dimulai melawan Uni Soviet (Rusia), tetap mempertahankan eksistensinya secara militer dan ekonomi. Amerika membangun pangkalan militer di Filipina pada dua tempat, yakni Clark dan Subic (Working Paper, 21 Desember 2010, hal 1).

Amerika Serikat Pasca Perang Dunia II

Keterlibatan Amerika Serikat di Asia Tenggara Pasca Perang Dunia II lebih dipengaruhi faktor politik, yakni persaingannya dengan Uni Soviet dan Cina. Seusai Perang Dunia II Uni Soviet dan Cina muncul sebagai kekuatan baru. Kedua Negara itu sama-sama berpaham komunis sehingga menyeret Amerika ke kancah Perang Ideologi (Liberal vs Komunis).

Konflik terbuka Amerika dengan Uni Soviet dan Cina dimulai di Indo China, khususnya Vietnam. Dalam Perjanjian Postdam, September 1945, disepakati pengambilalihan Indo China dari tangan Jepang, bahwa Cina akan menduduki bagian utara pada garis lintang 16, dan sisanya diserahkan pada pasukan Inggris. Akan tetapi ketika Jenderal Gracey tiba di Saigon tanggal 13 September 1945 seluruh kota sudah diduduki oleh pasukan gerilyawan Vietnam yang beraliran nasionalis. Akhirnya pasukan Inggris di tarik dari bagian selatan Vietnam (D.G.E. Hall, 1986, hal 792).

Berbeda halnya di utara, pemerintah Cina membiarkan pasukan Ho Chi Minh yang beraliran komunis menguasai daerah kota (Hanoi) dan pemerintahan. Pasukan Prancis yang ditugaskan bersama-sama dengan Cina ditolak masuk ke Hanoi oleh pasukan Ho Chi Minh. Februari 1946 disepakati perjanjian antara Cina dengan Prancis, dimana Cina bersedia menarik pasukannya dari utara dan menyerahkan sepenuhnya pengawasan Hanoi kepada Prancis. Sebagai imbalannya Cina diizinkan membangun jalan kereta api Yunnan – Hanoi (D.G.E. Hall, 1986: 792).

Kehadiran Prancis di utara menimbulkan perang dengan pasukan Ho Chi Minh. Terlebih lebih setelah Ho Chi Minh memproklamkan kemerdekaan Vietnam Utara (Viet Minh) pada bulan Mei 1948. Situasi makin memanas ketika Cina dan Rusia mengakui pemerintahan Ho Chi Minh, sehingga konflik Indo China makin meluas (D.G.E. Hall, 1986, hal 795).

Kehadiran Rusia dan Cina di Indo China memancing Amerika Serikat untuk ikut terlibat dalam kancah Perang Dingin. Amerika Serikat dan sekutunya dengan segera mengakui pemerintahan Bao Dai yang beraliran nasionalis. Perang terbuka segera terjadi antara Prancis versus Viet Minh. Pada akhirnya pasukan Prancis tidak mampu mengatasi kekuatan gerilyawan Viet Kong, sehingga terpaksa angkat kaki pada tahun 1954 (D.G.E. Hall, 1986, hal 795).

Amerika Serikat segera menggantikan peran Prancis di Indo China. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memperkuat posisi

Vietnam Selatan, dengan mendatangkan pasukan dalam jumlah besar. Pemerintahan bentukan Amerika di Vietnam Selatan di bawah Ngo Dinh Diem kurang disukai oleh rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan. Perkembangan di Vietnam Selatan makin memburuk dengan munculnya Front Pembebasan Nasional Vietnam Selatan (FPNVN), yang lebih dikenal dengan nama Vietcong pada tahun 1960 (Farida Welly, 2005, hal 51).

Kehadiran Vietcong menyebabkan munculnya perang terbuka dengan Amerika. Untuk menumpas pasukan Vietcong ini pemerintah Amerika mengirim tentara dalam jumlah besar, hampir mencapai 500 ribu orang. Pasukan ini tidak hanya ditugaskan untuk mengatasi perlawanan Vietcong di selatan, namun juga untuk memerangi Ho Chi Minh (Viet Minh) di utara. Hal ini menyeret Amerika ke dalam kancah perang Vietnam yang berlarut larut.

Perang Vietnam berlangsung dari tahun 1959 sampai jatuhnya Saigon tahun 1975. Sekalipun sepanjang waktu perang itu Amerika Serikat selalu mengklaim bahwa tentara mereka selalu menang dalam setiap pertempuran besar melawan pasukan Vietnam Utara dan Vietcong. Namun sebenarnya akhir perang menunjukkan Amerikalah yang mengalami kekalahan perang terbesar sepanjang sejarahnya. Hal itu dilihat dari besarnya jumlah korban perang dari pihak Amerika Serikat. Hingga tahun 1971 Amerika sudah kehilangan lebih dari 45.000 tentaranya. Ironisnya lagi Amerika Serikat tidak pernah bisa menuntaskan misinya untuk menguasai Vietnam hingga tahun 1975. Di samping itu Perang Vietnam semakin tidak populer di kalangan masyarakat Amerika sendiri, serta dunia internasional (<http://sejarahperang.com/2009/08/30/>), hal 16).

Arti Strategis Asia Tenggara Bagi Amerika Pasca Perang Dingin

Keterlibatan Amerika Serikat dalam kancah politik dan keamanan di Asia Tenggara, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia I, bukanlah tindakan tanpa dasar. Bagaimanapun kawasan Asia Tenggara tetap penting bagi Amerika, sekalipun Perang Dingin sudah usai. Dalam hal ini skala kepentingan Amerika terhadap Asia Tenggara berubah sesuai dengan perubahan konstelasi politik dunia.

Setelah berakhirnya Perang Vietnam, Amerika Serikat punya komitmen untuk tidak terlibat aktif lagi dalam konflik politik yang terjadi di Asia Tenggara. Washington mengeluarkan slogan "Tragedi Vietnam tidak boleh terjadi lagi" (Robert A. Scalapino, 1985, hal 167). Implikasinya adalah negara-negara Asia Tenggara yang mengalami konflik politik harus menyelesaikannya sendiri, atau bersama-sama dalam kawasan. Itulah sebabnya ketika terjadi konflik Kamboja antara Khmer Merah dengan Khmer Putih Amerika

Serikat tidak lagi melibatkan diri secara langsung, sekalipun konflik itu juga berlandaskan ideologi. Justru pada akhirnya konflik Kamboja berhasil diselesaikan oleh negara-negara ASEAN sendiri, khususnya Indonesia, pada awal tahun 1990-an.

Pentingnya kawasan Asia Tenggara bagi Amerika Serikat dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: Geo Ekonomis, Geo Strategis, Geo Politis. Secara Geo Ekonomis kawasan Asia Tenggara penting bagi Amerika sebagai partner ekspor dan impor. Sejak tahun 1990-an Asia Tenggara merupakan partner perdagangan kelima terbesar bagi Amerika. Di samping itu Asia Tenggara juga menjadi kawasan tujuan investasi langsung (Foreign Direct Investment), melebihi Jepang dan Brazil (Working Paper, 21 Desember 2010, hal 4).

Secara ekonomi jumlah penduduk Asia Tenggara yang relatif banyak menjadikan kawasan itu sebagai daerah potensial pelepasan produk-produk industri dan jasa Amerika Serikat. Setelah Jepang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tersebar luas di Asia Tenggara, meliputi industri manufaktur, industri energi, dan industri jasa (Working Paper, 21 Desember 2010, hal 4).

Kepentingan Geo Strategis Amerika Serikat di Asia Tenggara disebabkan letak Asia Tenggara yang strategis antara dua Samudera sehingga di kawasan ini terdapat tiga jalur pelayaran utama. Pertama, jalur Timur – Barat, yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Kedua, jalur Utara – Selatan yang menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Australia dan Selandia Baru. Ketiga, jalur pintu masuk kawasan Asia Tenggara, yang terdiri dari: Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Geo Strategis Asia Tenggara yang seperti itu mewakili dua kepentingan Amerika Serikat sekaligus, yakni kepentingan ekonomi, dan keamanan (Robert A. Scalapino, 1985, hal 145-157).

Kemudian secara Geo Politis, kawasan Asia Tenggara menjadi garansi keamanan bagi Amerika Serikat di masa depan. Jumlah penduduk yang besar, dengan budaya yang beragam, dan sistem pemerintahan yang cenderung lemah menjadi ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat. Apalagi Indonesia yang memiliki populasi penduduk terbesar ke empat, serta komunitas muslim terbesar di dunia, dapat menjadi ancaman politik yang serius bagi Amerika Serikat. Kondisi ini tentu saja membuat Amerika harus menjaga hubungan yang baik dengan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara (Working Paper, 21 Desember 2010, hal 7-8).

2. PENUTUP

Kedatangan Amerika Serikat pertama kali ke Asia Tenggara lebih didorong oleh kepentingan ekonomi. Akan tetapi setelah berakhirnya Perang Dunia II kepentingan politik dan keamanan lebih menjadi pertimbangan utama bagi negara itu. Kehadiran Amerika Serikat di Asia Tenggara telah

menyebabkan Filipina jatuh kepada kekuasaan imperialisme baru. Dengan dalih membantu Filipina membebaskan diri dari penjajahan Spanyol, Amerika Serikat berhasil menguasai negara itu selama lebih kurang 50 tahun.

Berakhirnya Perang Dunia II mendorong Amerika Serikat untuk terlibat dalam konflik Vietnam. Tujuan yang semula hanya untuk mencegah menyebarnya pengaruh komunis di kawasan Indo Cina khususnya, dan Asia Tenggara Tenggara umumnya, pada akhirnya menyeret Amerika dalam perang panjang melawan Vietnam yang dibantu Cina dan Rusia.

Selepas Perang Dingin hubungan Amerika Serikat dengan Asia Tenggara makin intens, dan meliputi berbagai aspek, yakni ekonomis, politik keamanan. Dalam hubungan ini Amerika Serikat menghindari untuk terlibat langsung dalam konflik politik yang terjadi di negara negara kawasan Asia Tenggara, seperti Kamboja.

3. DAFTAR RUJUKAN

- Bradley William. L dan Lubis, Mochtar. 1991. *Dokumen Dokumen Pilihan Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Scalapino, Robert A. 1985. *Asia Tenggara Dalam Tahun 1980-an*. (Jakarta: CSIS).
- Hall, D.G.E. 1986. *Sejarah Asia Tenggara (Terjemahan)*. (Surabaya: Nasional).
- Kamal, Mukhtar. 1986. *Buku Ajar Sejarah Asia Tenggara* (IKIP Padang).
- Welly, Farida. 2005. *Hand- Out Sejarah Asia Tenggara* (Labor Sejarah FIS UNP)
- Eduardus. Working Paper: Amerika Serikat dan Asia Tenggara, 21 Desember 2010.
<http://sejarahperang.com/2009/08/30/kekalahan-terbersar-as-dalam-sejarahny/>
- Wikipedia bahasa Indonesia, Sejarah Asia Tenggara, 2008.